



**DISKOMINFOTIKSAN
KOTA PEKANBARU**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2023



**PEMERINTAH
KOTA PEKANBARU**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, Laporan Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru tahun 2023 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian merupakan wujud nyata dari pelaksanaan rencana pembangunan yang berbasis kinerja yang mengacu kepada RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan RKPD Kota Pekanbaru. Diharapkan nantinya LKjIP 2023 ini dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 guna meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 ini.

Pekanbaru, Januari 2024

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
Statistik dan Persandian

Kota Pekanbaru



RAJA HENDRA SAPUTRA, S.STP
Pembina (IV.a)
NIP. 19820927 200012 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi	3
1.3. Aspek Strategis Organisasi.....	4
1.4. Sistematika Penyajian	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. Rencana Strategis	8
2.2. Indikator Kinerja Utama	9
2.3. Perjanjian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	17
3.2. Realisasi Anggaran	28
BAB IV PENUTUP	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) memiliki tiga (3) landasan utama yaitu: Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP, serta Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada hakekatnya merupakan sinergi dari akuntabilitas manajerial, akuntabilitas proses dan akuntabilitas program yang saling mendukung dan saling terkait satu sama lain. Akuntabilitas manajerial menitikberatkan pada efisiensi, efektivitas dan kehematan dalam penggunaan dana harta kekayaan, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Akuntabilitas proses menitikberatkan pada kebutuhan terhadap peraturan perundang–undangan dalam pelaksanaan kegiatan–kegiatan untuk pencapaian misi organisasi. Sedangkan akuntabilitas program pada dasarnya memberikan perhatian yang besar

pada pencapaian hasil kegiatan instansi pemerintah. Dalam hal ini seluruh aparatur pemerintahan berkemampuan untuk mencapai hasil sesuai dengan misi yang diembannya, bukan hanya sekedar patuh terhadap kebutuhan hirarki atau prosedur.

Pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah yang beraneka ragam dan kompleks memerlukan dukungan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-uundangan dan kebijakan yang berlaku, aman sebagai kebijakan dan program pembangunan dari tindakan pemborosan, kerugian dan penyalah gunaan serta menjamin tersedianya data yang dapat dipercaya (akurat) dan dapat diungkapkan secara memadai dalam suatu laporan secara berkala dan melembaga. Selain itu, perlu pula diungkapkan proses pelaksanaan berbagai dinamika interaksinya dengan lingkungan.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekanbaru, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Oleh karena itu sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugas pokok maka perlu menyusun laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama tahun 2023 sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2023, sehingga LKjIP merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai tolak ukur dalam rangkameningkatkan kinerja pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat.

Dengan demikian, dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, para pejabat dan pegawai yang berwenang diharuskan tidak saja bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga bertanggung jawab pada peningkatan kompetensi profesional dan daya saing melalui berbagai pengembangan kebijakan dan program secara efisien dan efektifitas sumber daya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah diperlukan suatu perubahan fokus/orientasi manajemen instansi pemerintah yang semula lebih berfokus pada kegiatan yang terkait dengan keluaran (output) menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih dihubungkan dengan hasil (outcome) yang diperoleh.

Akuntabilitas kinerja dimaksud harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Di samping itu, harus pula menyajikan penjelasan tentang deviasi antara yang telah ditetapkan dengan realisasi kegiatan yang dicapai. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tersebut diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir pada pengukuran kinerja atas kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

1.2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Sebagai Perangkat daerah yang keberadaannya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Sedangkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 227 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, yaitu melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah yang meliputi hubungan pemberdayaan potensi informasi, penyampaian informasi baik langsung maupun melalui media, pengembangan aplikasi TIK, statistik dan persandian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Perangkat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian dan tugas pembantuan lainnya;
- b. perumusan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- c. perumusan dan penetapan rencana umum urusan dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- d. perumusan peraturan dan perundang-undangan daerah serta kebijakan teknis dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- e. pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- f. pengkoordinasian dan pengarahan pengelolaan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada dinas.
- g. pelaporan pelaksanaan tugas, saran dan pertimbangan kepada Walikota sebagai bahan evaluasi;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Aspek Strategis Organisasi

Dalam pelaksanaan visi dan misi Walikota Pekanbaru, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian berada di misi ketiga, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Baik, dengan tujuan Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas, dengan sasaran Terwujudnya Pelayanan Publik yang terintegrasi dan Transparan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, memiliki beberapa Isu Strategis dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, yaitu:

1. Penerapan e-government dalam menunjang Reformasi Birokrasi belum optimal
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan public

3. Belum optimalnya sistem informasi layanan yang saling terkoneksi antar OPD
4. Belum optimalnya fasilitas jaringan informasi bagi publik pada area public
5. Belum optimalnya proporsi pengguna internet dalam penyediaan informasi bagi masyarakat

1.4.Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan bentuk dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintahan atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatik, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023. Capaian kinerja (performance result) tahun 2023 diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian Kinerja (PK) sendiri merupakan penjabaran Perubahan Renstra Tahun 2023-2026. Analisis atas capaian kinerja terhadap Rencana Kinerja tahun 2023 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru yang terdiri dari Tugas Pokok, fungsi dan struktur organisasi, isu-isu strategis, sistematika laporan kinerja dan landasan hukum.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berisi gambaran singkat mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Rencana Anggaran dan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru Tahun 2021.

3. AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi uraian mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru Tahun 2022.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan Analisa capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan atas capaian kinerja organisais serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Tantangan birokrasi masa depan meliputi berbagai aspek, baik dalam negeri maupun mancanegara yang bersifat alamiah maupun sosial budaya, sosial politik, pertahanan dan keamanan, ilmu pengetahuan serta responsible dan accountable. Seiring dengan itu penerapan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas dan professional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Government) dan bersih, bebas KKN (Clean Government) yang juga merupakan pesan agenda reformasi. Kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dapat dicapai melalui proses belajarsecara terus menerus tanpa ada batas akhir, karena pada dasarnya proses belajar itu merupakan Long Life Learning bagi setiap manusia proses belajar bagi aparat pemerintah daerah guna mencapai kualitas dan profesionalisme yang diharapkan dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah daerah.

1. Mewujudkan Peningkatan E-Government dan Peningkatan Profesionalisme

Pemenuhan infrastruktur jaringan yang terpadu diperlukan sebagai landasan konektifitas bagi komunikasi data layanan teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi modern yang berbasis teknologi informasi merupakan faktor pendukung untuk meningkatkan kualitas layanan informasi yang bisa diakses secara cepat dan tepat.

Sistem aplikasi yang terintegrasi merupakan penyatuan berbagai macam aplikasi layanan pemerintahan untuk memudahkan pertukaran data antar instansi pemerintahan sebagai perwujudan layanan e-government bagi masyarakat. Peningkatan e-gov dapat terlaksana dengan baik manakala terdukung peningkatan keamanan sistem informasi, peningkatan cakupan infrastruktur jaringan serta mekanisme peneglolaan data yang terintegrasi.

Selain itu perlu meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia untuk memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan prima.

Peningkatan kompetensi SDM tidak hanya bagi pengelola, namun juga kepada pengguna, sehingga pemanfaatan teknologi informasi betul-betul bisa berdampak positif dan saling mengisi.

2. Mewujudkan Transparansi Komunikasi Dan Informasi Yang Handal Melalui Komunikasi Sosial, Dan Kemitraan Profesi

Guna mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi dilakukan dengan menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai komunitas lokal, nasional maupun internasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan sarana potensi lokal untuk mendukung program pemerintah dalam layanan komunikasi dan informasi. Pengembangan transparansi komunikasi dan informasi pada komunikasi sosial dilakukan dengan pengembangan dan peningkatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berbasis IT.

Disamping itu juga dilakukan dengan penguatan kemitraan profesi dengan penguatan jejaring pada mitra profesi di bidang komunikasi dan informasi. Keterbukaan informasi publik merupakan kebutuhan masyarakat dan hak masyarakat untuk tahu, oleh karena itu untuk sinergitas informasi dan dokumentasi antara pemerintah atau badan publik kepada masyarakat dan antar masyarakat diperlukan penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik PPID Kota maupun PPID OPD.

Penyebarluasan informasi kepada masyarakat juga dilakukan melalui berbagai sarana yang tumbuh berkembang di masyarakat yaitu pelaksanaan dialog publik, pertunjukan rakyat, baliho, spanduk, leaflet dan sarana penyebarluasan informasi luar ruang lainnya.

2.2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang

Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1		Nilai Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 tahun 2010 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektratik	47 Indikator Berdasarkan Permenpan No 5 Tahun 2021	Kemernterian Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	
2	Meningkatnya Pelayanan Publik yang terintegrasi dan Transparan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).	Persentase Pemanfaatan Layanan Publik Berbasis TIK	Presentase	Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 tahun 2010 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektratik	(Jumlah Pemanfaatan Layanan Publik/Jumlah layanan Publik yang ada) x 100%	Dinas Kominfo Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru	
3		Indeks Pengamanan Sistem Informasi Pemerintahan	Nilai	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No.4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Kota Pekanbaru		
4	Meingkatnya Layanan Akses Data Statistik Sketoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang Tersedia	Presentase		(Jumlah Data Statistik Sektoral Yang Tersedia/Jumlah Data Statistik Sektoral) x 100%	Dinas Kominfo Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru	
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Diskominfo Kota Pekanbaru	Nilai	Terlayannya IKM OPD dengan baik dan sesuai pedoman	Nilai IKM dan Hasil Survey IKM	Diskominfotiksan	Laporan pelayanan OPD

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari kepala daerah kepada Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel 2.3.1 Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran 2023
1	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik		Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2.7 (Baik)
			Nilai IKM Kota Pekanbaru	Nilai	85,58
		Meningkatnya Pelayanan Publik yang terintegrasi dan Transparan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).	Persentase pemanfaatan layanan public berbasis TIK	Persentase	35%
			Indeks Pengamanan Sistem Informasi Pemerintahan	Nilai	C
		Meningkatnya Layanan Akses Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia	Persentase	45%
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Diskominfo Kota Pekanbaru	Nilai	C

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perjanjian kinerja Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian memiliki beberapa indikator tujuan/sasaran. Indikator tujuan/sasaran yang pertama adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikator tujuan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kota, memiliki satuan indeks, dengan target tahun 2023 adalah 2.7. Indikator tujuan yang kedua adalah IKM Kota, memiliki satuan nilai, dengan target tahun 2023 sebesar 85.58. Ketiga indikator tujuan /sasaran tersebut merupakan target capaian pemerintah Kota Pekanbaru.

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatik, Statistik dan Persandian memiliki tiga sasaran. Sasaran yang pertama adalah Meningkatnya Pelayanan Publik yang terintegrasi dan Transparan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang memiliki dua Indikator tujuan/sasaran. Indikator tujuan/sasaran yang pertama adalah Persentase pemanfaatan layanan public berbasis TIK, memiliki target kinerja pada tahun 2023 sebesar 35%. Indikator tujuan/sasaran yang kedua adalah Indeks Pengamanan Sistem Informasi Pemerintahan yang memiliki arget tahun 2023 dengan indeks C.

Sasaran yang kedua adalah Meningkatnya Layanan Akses Data Statistik Sektoral, dengan indikator tujuan/sasaran Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia, yang memiliki target kinerja tahun 2023 sebesar 35%.

Sasaran yang ketiga adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan. Sasaran ini memiliki dua indikator tujuan/sasaran. Indikator yang pertama adalah Nilai IKM Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, dengan target kinerja tahun 2023 dengan nilai C.

Tabel 2.3.2. Program Kegiatan yang Mendukung Sasaran

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN 2023
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.546.464.214
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.750.780
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.131.123.800
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	832.579.608
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272.175.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.330.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	231.505.026
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	8.064.529.275
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.064.529.275
	Program Aplikasi Informatika	6.809.407.172
	Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	209.893.140
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.599.514.032
	Program Penyelenggara Persandian Untuk Pengamanan Informasi	156.798.715
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	71.587.500
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	85.211.215
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	420.632.233
	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	420.632.233

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian pada tahun 2023 melaksanakan 5 program yang mendukung pencapaian kinerja. Pertama adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 5.546.464.214. Yang kedua adalah Program Informasi dan Komunikasi Publik yang memiliki anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 8.064.529.275. Yang ketiga adalah Program Aplikasi Informatika yang memiliki anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 6.809.407.172. Yang keempat adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial yang memiliki anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 420.632.233. Yang kelima adalah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi yang memiliki anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 420.632.233.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan jawaban dan penjelasan dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok pengukuran yang telah tercantum dalam Renstra SKPD. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.

Pengukuran kinerja membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja maka disusunlah program dan kegiatan untuk mendukung capaian sasaran strategis. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut maka ditetapkan indikator kinerja dari sasaran sebagai alat ukur. Berdasarkan hasil pengukuran indikator

kinerja sasaran, maka dapat dievaluasi nilai capaian masing-masing indikator kinerja tersebut. Adapun capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja

Membandingkan antara target yang telah ditetapkan di awal Tahun 2023 dengan realisasi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1.1 dibawah ini :

Tabel 3.1.1 Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Tahun 2023		
					Target Kinerja	Realisasi	Sasaran
1	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik		Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2.7	3.42	100%
			Nilai IKM Kota Pekanbaru	Nilai	85,58	86.21	100%
		Meningkatnya Pelayanan Publik yang terintegrasi dan Transparan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).	Persentase pemanfaatan layanan public berbasis TIK	Persentase	35%	88%	100%
			Indeks Pengamanan Sistem Informasi Pemerintahan	Nilai	C	C	100%
		Meningkatnya Layanan Akses Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia	Persentase	45%	65%	100%
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Diskominfo Kota Pekanbaru	Nilai	C	B	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Pada sasaran yang pertama adalah Meningkatnya Pelayanan Publik yang terintegrasi dan Transparan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), memiliki beberapa indikator, yang pertama adalah Persentase pemanfaatan layanan public berbasis TIK dengan target tahun 2023 sebesar 35%, dengan realisasi sebesar 65%, dan capaian 100%. Yang kedua adalah Indeks Pengamanan Sistem Informasi Pemerintahan dengan target indeks C, dengan realisasi C, dan capaian 100%.

Sasaran yang kedua adalah Meningkatnya Layanan Akses Data Statistik Sektoral, dengan indikator tujuan Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia dengan target sebesar 45%, adapun realisasinya sebesar 65%, dan capaian 100%.

Sasaran yang ketiga adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, memiliki dua indikator tujuan, yang pertama adalah Nilai IKM Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang memiliki target dengan nilai C, dengan realisasi nilai B, dan capaian sebesar 100%.

- b. Membandingkan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Tabel 3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022 Dengan Capaian Kinerja Tahun 2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
					Target Kinerja	Realisasi	Sasaran	Target Kinerja	Realisasi	Sasaran
1	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik		Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	4	2.83	70.75%	2.7	3.42	100%
			Nilai IKM Kota Pekanbaru	Nilai	85.50	85.45	100%	85,58	86.21	100%
		Meningkatnya Pelayanan Publik yang terintegrasi dan Transparan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).	Persentase pemanfaatan layanan public berbasis TIK	Persentase	85%	85%	100%	35	88	100%
			Indeks Pengamanan Sistem Informasi Pemerintahan	Nilai	A	C	50%	C	C	100%
		Meningkatnya Layanan Akses Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia	Persentase	95%	100%	100%	45	65	100%
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Diskominfo Kota Pekanbaru	Nilai	A	B	100%	C	B	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perbandingan capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun 2022 memiliki beberapa tujuan. Sasaran yang pertama adalah Meningkatnya Pelayanan Publik yang terintegrasi dan Transparan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memiliki dua indikator tujuan. Indikator tujuan yang pertama adalah Persentase pemanfaatan layanan public berbasis TIK yang memiliki satuan persentase.

Pada tahun 2022 memiliki target 85%, realisasi 85%, dan capaian 100%. Untuk tahun 2023 memiliki target 35%, realisasi 88%, dan capaian 100%. Indikator tujuan yang kedua adalah Indeks Pengamanan Sistem Informasi Pemerintahan yang memiliki satuan indeks. Pada tahun 2022 memiliki target A, realisasi C, dan capaian 50%. Untuk tahun 2023 memiliki target C, realisasi C, dan capaian 100%.

Sasaran yang ketiga adalah Meningkatnya Layanan Akses Data Statistik Sektor yang memiliki indikator tujuan Persentase Data Statistik Sektor yang tersedia dengan satuan persentase. Pada tahun 2022 memiliki target 95%, realisasi 100%, dan capaian 100%. Untuk tahun 2023 memiliki target 45%, realisasi 65%, dan capaian 100%.

Sasaran yang keempat adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang memiliki indikator tujuan Nilai IKM Diskominfo, dengan satuan nilai. Pada tahun 2022 memiliki target A, realisasi B, dan capaian 100%. Untuk tahun 2023 memiliki target C, dengan realisasi mencapai target yang ditetapkan yaitu dengan nilai B, dan capaian 100%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi

Berikut ini analisis terhadap penyebab keberhasilan/ kegagalan terhadap capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun 2022 :

1. Bidang Layanan Infrastruktur SPBE

a. Permasalahan :

- 1) Terjadinya rasionalisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2022 menyebabkan proses pengadaan barang/jasa di Bidang Layanan Infrastruktur SPBE tidak maksimal
- 2) Belum tersedianya kendaraan operasional Bidang Layanan Infrastruktur SPBE dalam menunjang pelaksanaan monitoring menara telekomunikasi.
- 3) Peningkatan kebutuhan akan sarana dan prasarana TIK di OPD yang tidak dibarengi dengan penambahan infrastruktur pendukung di Bidang Layanan Infrastruktur SPBE sebagai support system OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- 4) Penetapan PAD Retribusi Menara Telekomunikasi yang cukup tinggi.
- 5) Keterbatasan SDM pada Bidang Layanan Infrastruktur SPBE yang hingga saat ini (baik dari sisi kuantitas maupun kualitas kemampuannya) belum dapat ditambah.

b. Solusi :

- 1) Menjadikan program pada Bidang Layanan Infrastruktur SPBE menjadi program prioritas dan strategis Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mewujudkan Pekanbaru Smartcity Madani.
- 2) Menjadikan pengadaan kendaraan operasional Bidang Layanan Infrastruktur SPBE sebagai prioritas pengadaan kendaraan di Tahun Anggaran 2022 dan sebagai kebutuhan dalam Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Tahun 2022.
- 3) Menjadikan belanja modal pada program Bidang Layanan Infrastruktur SPBE sebagai belanja modal prioritas untuk meningkatkan layanan TIK kepada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

- 4) Perlunya kajian terhadap revisi PERWAKO Menara Telekomunikasi yang dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi lapangan saat ini.
- 5) Peningkatan kemampuan SDM melalui diklat, seminar, literasi digital dan penambahan jumlah SDM di Bidang Layanan Infrastruktur SPBE.

2. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

a. Permasalahan

- 1) Rasionalisasi Anggaran menyebabkan pengelolaan KIM kurang efektif
- 2) Monitoring opini dan aspirasi publik dilakukan secara manual sehingga kurang optimal dan membutuhkan waktu yang lama
- 3) Sarana dan Prasarana pelayanan PPID yang belum memadai.
- 4) Belum adanya tenaga fungsional yang cukup.
- 5) Kurangnya respon Perangkat Daerah terkait pengaduan, laporan dan permintaan informasi publik.

b. Solusi

- 1) Monitoring opini dan aspirasi publik menggunakan sistem informasi, sehingga hasil monitoring didapat dengan cepat.
- 2) Membangun ruang pelayanan PPID yang sesuai.
- 3) Perlu adanya penambahan dan peningkatan kompetensi staf Bidang PIKP
- 4) Memperluas cakupan sosialisasi tentang PPID dan LAPOR!-SP4N sehingga terjadi peningkatan dalam pelayanan pengaduan dan informasi publik
- 5) Penambahan anggaran kegiatan.

3. Bidang Statistik

a. Permasalahan

- 1) Kurangnya kualitas serta kuantitas SDM bidang statistik.
- 2) Sarana dan Prasarana pendukung yang kurang memadai.

- 3) Pelaksanaan sosialisasi yang kurang di bidang statistik.
- 4) Validasi, pemanfaatan, pengelolaan dan up dating data statistik sektoral yang belum optimal.

b. Solusi

- 1) Penambahan sumber daya manusia yang berkualitas
- 2) Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai.
- 3) Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan tentang statistik.
- 4) Meningkatkan validasi, pemanfaatan, pengelolaan dan up dating data statistik sektoral yang optimal.

4. Bidang Layanan, Aplikasi dan Persandian/Keamanan SPBE

a. Permasalahan

- 1) Kurangnya kualitas serta kuantitas SDM Bidang Layanan, Aplikasi dan Persandian/Keamanan SPBE.
- 2) Sarana dan Prasarana pendukung yang kurang memadai
- 3) Pelaksanaan sosialisasi yang kurang di Bidang Layanan, Aplikasi dan Persandian/Keamanan SPBE.
- 4) Keterbatasan peralatan pendukung utama dan wajib persandian.
- 5) Pengembangan Sistem Informasi yang belum keseluruhan terintegrasi.
- 6) Pengembangan Pelayanan berbasis elektronik secara online yang belum maksimal.
- 7) Belum tersedianya kebijakan internal untuk beberapa indikator SPBE

b. Solusi

- 1) SDM merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi TIK, bagaimanapun baiknya Teknologi

Informasi bila tidak didukung oleh SDM yang cukup maka Implementasinya kurang maksimal.

- 2) Sosialisasi system Informasi dan Teknologi Informasi seperti: (Pelatihan, Buletin, dll)
- 3) Penguasaan Sistem Informasi dan Tekhnologi Informasi - Pemanfaatan Sistem Informasi dan Tekhnologi Informasi
- 4) Pengembangan Sistem Informasi yang belum keseluruhan terintegrasi perlu adanya langkah-langkah strategis yaitu mengembangkan Sistem Informasi yang dapat diakses secara interaktif dengan mudah oleh masyarakat. Seperti Sistem Informasi yang berbasis internet (Web Based)
- 5) Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai.
- 6) Mempercepat pembuatan kebijakan internal terkait indikator SPBE

e. Program Kegiatan Yang Mendukung Publik

Berikut ini program/kegiatan yang mendukung sasaran pencapaian kinerja:

1. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

1) Jurnalis OPD

Jurnalis OPD merupakan inovasi dari Diskominfo Kota Pekanbaru terkait dengan diseminasi informais dan pengumpulan berita pembangunan daerah dari seluruh perangkat daerah yang ada. Sehingga penyebarluasan informasi dapat lebih masif dan sumber pemberitaan lebih bervariasi.

2. Bidang Persandian, Aplikasi, dan Tata Kelola SPBE

2) Call center 112 dan Command Center

Call center 112 dan command center memiliki tugas mendukung terwujudnya Pekanbaru sebagai smart city madani. Tugas pokok dari call center 112 adalah menerima pengaduan yang terjadi di lingkungan Kota Pekanbaru, sehingga pemerintah dapat merespon

dengan cepat kejadian yang terjadi di lingkungan Kota Pekanbaru. Sementara command center memiliki tugas menerima pengaduan dari tiap OPD yang berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika

3. Bidang Layanan Infrastruktur SPBE

1) Penyediaan Pusat Data

Layanan Hosting berbagai OPD yang difasilitasi melalui pusat data diskominfotiksan kota pekanbaru dimana beberapa aplikasi memiliki interoperabilitas dengan aplikasi lainnya untuk menghasilkan satu data bersama pemerintah kota pekanbaru

2) Interkonetifitas

Menghubungkan seluruh layanan OPD yang ada di pemerintah kota pekanbaru kedalam satu jaringan intra pemerintah daerah

3) Monitoring Pengawasan Menara Telekomunikasi

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru disektor Retribusi

4. Bidang Statistik

1) Bank Data

Aplikasi bank data ini berguna untuk memudahkan dalam menyimpan data dan mentransfer data sehingga mudah di akses dimana saja dan kapan saja. Bank data ini merupakan inovasi hasil inovasi dari Diskominfo statistik dan persandian Kota Pekanbaru dalam mendukung Pekanbaru smart city <http://bankdata.pekanbaru.go.id/>

3.2. Realisasi Anggaran

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023 Terdiri dari 5 program dan 12 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 20.997.831.609 (Dua Puluh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah) dengan realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1 Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN 2023	REALISASI	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		5.546.464.214	4.859.922.630	89 %
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.750.780	21.783.930	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.131.123.800	3.868.970.830	
		Adminsitasi Umum Perangkat Daerah	832.579.608	567.648.309	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272.175.000	222.563.280	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.330.000	32.606.024	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	231.505.026	146.350.257	
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik		8.064.529.275	7.743.912.276	94 %
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.064.529.275	7.743.912.276	
	Program Aplikasi Informatika		6.809.407.172	6.340.006.722	99 %

		Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	209.893.140	189.539.001	
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.599.514.032	6.150.467.721	
	Program Penyelenggara Persandian Untuk Pengamanan Informasi		156.798.715	127.053.250	81 %
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	71.587.500	63.936.850	
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	85.211.215	63.116.400	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		420.632.233	388.540.390	92 %
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	420.632.233	388.540.390	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru berdasarkan tolak ukur perencanaan strategis dan sistem akuntabilitas yang memadai.

LKjIP ini akan berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban instansi kepada publik. Oleh karena itu, LKjIP Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru ini diharapkan akan menumbuhkan saran-saran dan kritik-kritik yang konstruktif terhadap eksistensi internal dan eksistensi eksternal Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru.

Sebagai satu-satunya instansi yang menangani infrastruktur TIK di Pemerintahan Kota Pekanbaru, baik pemasangan infrastruktur TIK, maupun perawatan (maintenance) serta bidang komunikasi Statistik dan Persandian lainnya maka Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru harus selalu menjaga kualitas kinerja, kerana hal tersebut akan terkait langsung dengan kualitas Infrastruktur TIK di pemerintahan Kota Pekanbaru. Dengan diterbitkannya LKjIP ini semestinya menjadi landasan fundamental bagi Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru untuk selalu konsisten dan berkelanjutan meningkatkan kualitas kinerjanya, sehingga dapat menghasilkan infratraktur TIK yang berkualitas, serta dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Demikian LKjIP Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru Tahun 2023 ini dibuat dan diharapkan akan menumbuhkan saran-saran dan

kritik-kritik yang konstruktif terhadap eksistensi internal dan eksistensi eksternal Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru.

Akhirnya LKjIP ini disertai dengan harapan semoga akan menjadi landasan fundamental bagi Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru untuk selalu meningkatkan kinerjanya dalam tahun-tahun mendatang.